TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER

TELAAH KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD DALAM TINJAUAN FIKIH

Buku ini merupakan bunga rampai dari kumpulan artikel yang ditulis oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Buku ini menyajikan konsep mengenai transaksi keuangan yang diaplikasikan di bank syariah, IKNB syariah, serta berbagai transaksi keuangan kontemporer yang ada di masyarakat. Pembahasan pada buku ini diulas mulai dari konsep dasar, regulasi, serta tinjauan fikih yang difokuskan pada analisis akad yang diimplementasikan dengan merujuk kepada pandangan para ulama, serta fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Beberapa topik bahasan yang diulas antara lain Sharia Card pada Bank Syariah, Jual Beli Valuta Asing, Pasar Uang antar Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pergadaian Syariah, Reksadana Syariah, E-Commerce, Uang Elektronik, Jasa Titip, dan Financial Technology (Fintech). Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi aktif mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah untuk turut meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

ISBN 978-623-315-569-4

9 786233 155694

TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER TELAAH KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD DALAM TINJAUAN FIKIH

TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER

TELAAH KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD DALAM TINJAUAN FIKIH

Fara Fitra Ramadani, dkk

TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER

Telaah Konsep dan Implementasi Akad dalam Tinjauan Fikih

Fara Fitra Ramadani, Deffia Dea Vitaloka, Shafa Safira,
Hamidatuzzahra Mualo, Maghfiratunnisa A, Nabil Ahmad
Izzudin, Virda Alya Novbira Mya, Govi Maulana, Efdy Dwi
Saputra, Harrish Muhammad Ramadhani, Umar Sidhi Wahab,
Vina Roikhatul Jannah, Bahirina Mujtaba, Dewi Amalia Putri, Ria
Fajriati, Muhamad Abriyansyah, Afda Humairoh, Adinda Naziha
Azzahra, Hanifa Budiwati Utami, Talitha Abigail, Diazahra
Azkiya, Tasya Safira, Farah Sharfina, Daffa Azky Trevaes, Mae
Mona Indriana, Salwa Syarif, Nabila Azzahra Tanjung, Sabrina
Azzahra, Auliya Muharramah, Radella Kus Damalis Abdullah,
Alya Salsabila R.A, Faris Arkanadhytama R, Salsa Bila Ramadhan,
Ulfi Nurhalimah

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER

Telaah Konsep dan Implementasi Akad dalam Tinjauan Fikih

Tim Penulis:

Fara Fitra Ramadani, Deffia Dea Vitaloka, Shafa Safira,
Hamidatuzzahra Mualo, Maghfiratunnisa A, Nabil Ahmad
Izzudin, Virda Alya Novbira Mya, Govi Maulana, Efdy Dwi
Saputra, Harrish Muhammad Ramadhani, Umar Sidhi Wahab,
Vina Roikhatul Jannah, Bahirina Muhtaba, Dewi Amalia Putri, Ria
Fajriati, Muhamad Abriyansyah, Afda Humairoh, Adinda Naziha
Azzahra, Hanifa Budiwati Utami, Talitha Abigail, Diazahra
Azkiya, Tasya Safira, Farah Sharfina, Daffa Azky Trevaes, Mae
Mona Indriana, Salwa Syarif, Nabila Azzahra Tanjung, Sabrina
Azzahra, Auliya Muharramah, Radella Kus Damalis Abdullah,
Alya Salsabila R.A, Faris Arkanadhytama R, Salsa Bila Ramadhan,
Ulfi Nurhalimah

ISBN: 978-623-315-569-4

Editor:

Ade Nur Rohim, S.H.I, M.E.I.

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.com Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad saw.

Buku ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang tim penulis lakukan selama menjalani perkuliahan di mata kuliah Fikih Muamalah II. Proses yang dijalankan mulai dari telaah berbagai jurnal ilmiah hingga kepada telaah literatur dan buku yang relevan terkait isu kontemporer di bidang keuangan. Selain itu, kajian fikih terkait topik juga merujuk kepada fatwa para ulama, khususnya dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Buku ini disusun dengan membahas isu kontemporer keuangan syariah yang mencakup Pasar Uang Antar bank Syariah, Kartu Kredit, Jual Beli Valuta Asing, Asuransi Syariah, Pergadaian Syariah, Reksadana Syariah, Fintech Syariah, Uang Elektronik, *E-commerce*, hingga Jasa Titip.

Akhirnya, semoga buku ini bisa menambah khazanah keilmuan dan wawasan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, dan turut berkontribusi dalam mengembangkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Masukan dan saran sangat kami nantikan untuk penyempurnaan buku yang sederhana ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, Juli 2021

Tim Penulis

PENGANTAR EDITOR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang tak terhingga disampaikan kepada Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas curahan rahmat dan karunia-Nya, proses penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Teriring shalawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.

Buku yang hadir di tengah pembaca ini merupakan hasil kerja keras akademis yang dilakukan oleh para mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebuah proses dan langkah yang dilakukan dengan menelusuri berbagai kitab dan literatur, serta regulasi yang berkaitan dengan keuangan syariah kontemporer. Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi konkret para mahasiswa untuk turut meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat.

Kajian dalam buku ini difokuskan pada pembahasan mengenai berbagai konsep dasar dari praktik keuangan kontemporer yang berlaku di masyarakat saat ini, dengan ditinjau dari aspek regulasinya. Selain itu, pembahasan dalam mekanisme transaksi keuangan yang terjadi diulas dengan menelaah dari aspek akad yang diimplementasikan, dengan menggambarkan alur serta mekanisme yang terjadi di antara para pihak yang terlibat. Ulasan dan kajian terkait akad merujuk kepada pendapat para ulama fikih serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Akhirnya, tentu sangat disadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat dinantikan untuk menjadi bahan *muhasabah* dan perbaikan bagi peningkatan di program selanjutnya. Teriring harapan dan doa semoga para generasi muslim Indonesia, terus meningkatkan semangat dan motivasi untuk membumikan prinsip dan nilai syariah dalam

kesehariannya, khususnya dalam melakukan berbagai transaksi keuangan di era kontemporer seperti saat ini. *Wallahul musta'an.*

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, Juli 2021

Editor

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
PENGANTAR EDITOR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
KARTU KREDIT DAN <i>SHARIA CARD</i>	1
JUAL BELI VALUTA ASING	23
PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH	60
ASURANSI SYARIAH.....	83
PERGADAIAN SYARIAH	120
REKSADANA SYARIAH.....	138
<i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> (FINTECH)	162
UANG ELEKTRONIK (E-MONEY).....	185
<i>E-COMMERCE</i>	208
JASA TITIP (JASTIP).....	224

KARTU KREDIT DAN *SHARIA CARD*

Fara Fitra Ramadani
Deffia Dea Vitaloka
Shafa Safira
Hamidatuzzahra Mualo

Pendahuluan

Perbankan selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan masyarakat, setiap hari perbankan selalu mempunyai langkah dan fasilitas-fasilitas baru guna memenuhi kepentingan tersebut, salah satunya yaitu kartu kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank guna melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sistem yang terdapat di dalam kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan kepada nasabah uang dan bukan mengambil uang dari rekening.

Belakangan ini, perkembangan dunia perbankan banyak mengalami perubahan yang sangat pesat. Di mana uang yang menjadi objek perbankan mengalami perubahan lebih modern. Dalam perekonomian peranan uang antara lain dapat meningkatkan efisiensi bagi para pelaku ekonomi yaitu bagi produsen, konsumen, dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Saat ini di Indonesia perkembangan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional berjalan beriringan. Meskipun dalam perkembangannya kartu kredit konvensional telah mapan, namun perkembangan kartu kredit syariah juga tidak dipandang sebelah mata dalam perekonomian. Dalam perkembangannya kebutuhan akan sharia card dalam transaksi bisnis syaria'ah mengalami peningkatan.

Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia

Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh bank-bank di Amerika. Perkembangan kartu kredit sangat pesat, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor yang mendorongnya seperti kemudahan, kepraktisan dan citra diri

pemegang kartu (Asuan, 2013). Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis dalam penggunaan kartu kredit semakin berkembang dan semakin marak. Dapat dilihat dari jenis kartu kredit yang diterbitkan oleh bank terus bertambah, adanya peningkatan jumlah nasabah dan melonjaknya jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat dalam enam tahun terakhir antara tahun 2005-2010. Hingga akhir tahun 2010, diprediksikan bahwa kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai sekitar 14,15 juta kartu dengan nilai transaksi kurang lebih sebesar Rp157,48 triliun (Rahayu et al., 2011).

Kartu kredit semakin populer di kalangan masyarakat sebagai alat pembayaran jenis baru (pengganti uang tunai) dan menjadi gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Tingkat persaingan perusahaan penerbit kartu kredit semakin ketat seiring dengan maraknya bisnis kartu kredit di Indonesia. Baik dari pihak perbankan maupun pihak perusahaan/pelaku bisnis kartu kredit memiliki peluang untuk terus berlomba memperebut pangsa pasar, hal tersebut diyakini karena potensi pasar kartu kredit di Indonesia memiliki potensi yang besar.

Di era yang sudah semakin maju seperti sekarang ini, bukan hanya uang saja yang digunakan untuk alat pembayaran tetapi juga terdapat kartu ATM, kartu debit dan juga kartu yang merupakan simbol dari gaya hidup yang dikenal sebagai kartu kredit (Rahayu et al., 2011). Kartu kredit merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukar dengan jasa ataupun barang yang diinginkan pada tempat yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit (merchant) (Prayogo, 2014).

Perkembangan kartu kredit di Indonesia kini semakin ramai. Hal tersebut diketahui dari terus bertambahnya jenis kartu kredit yang telah diterbitkan, jumlah nasabah meningkat, dan meningkatnya jumlah kartu kredit beredar maupun nilai transaksinya (Rahayu et al., 2011). Pada saat ini kartu kredit telah menjadi pilihan dan juga gaya hidup dalam pemenuhan kebutuhan secara praktis oleh masyarakat perkotaan. Gaya hidup merupakan pola hidup dari seseorang di dunia yang

pengekspresian nya dalam aktivitas, minat dan juga opininya. Gaya hidup mendeskripsikan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor spiritual dan sosial juga termasuk suatu alasan atau bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, untuk menentukan langkah dalam segala urusan kehidupan (Qasas & Hakim, 2019).

Kartu Kredit adalah salah satu Alat Pembayaran yang Menggunakan Kartu (APMK). Dua Fungsi kartu kredit berbeda yang ditawarkan kepada konsumen yaitu sebagai sumber kredit dan alat pembayaran. Kartu kredit merupakan sistem pembayaran yang aman dan praktis. Apabila kartu kredit digunakan dengan bijak, maka kartu kredit akan memberikan manfaat. Saat kartu kredit digunakan dengan langkah yang salah, maka kartu tersebut akan mengakibatkan masalah finansial bagi penggunanya.

Kepemilikan kartu kredit di berbagai negara maju, cukup luas dikalangan masyarakat yang tingkat penetrasi nya mendekati nilai 100%, sedangkan di Indonesia, masih bisa dikatakan rendah. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bank Indonesia, perkembangan jumlah kartu kredit yang beredar pada tahun 2014 di Indonesia mencapai 16 juta pemilik. Namun hal tersebut masih jauh dengan target harapan, karena Bank Indonesia telah memproyeksikan kepemilikan kartu kredit pada tahun 2014 tumbuh mencapai 20–25% atau sebesar 30,01 juta–37,52 juta (Lestari, 2017).

Keberadaan dari kartu kredit tersebut telah banyak diketahui oleh masyarakat. Bagi sebagian kalangan, kartu kredit bisa mendukung gaya hidup mereka dan memanfaatkan nya pada hampir semua transaksi pembelian jasa ataupun barang. Tetapi, masih banyak konsumen yang belum mengetahui ataupun menggunakan kartu kredit dan bahkan sampai menolak menggunakan atau memiliki kartu kredit tersebut (Lestari, 2017).

Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah suatu alat pembayaran baru yang dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Dalam dunia perbankan kartu kredit dijadikan sebagai salah satu usaha perkembangan potensi, inisiatif serta kreasi dari alat-alat pembayaran jenis baru yang ada di sekitar masyarakat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit pasal 11, kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) atau dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kartu kredit adalah kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran baru dalam dunia perdagangan atau transaksi berupa kartu plastik yang memiliki nilai uang. Menurut Abdulkadir Muhammad surat berharga memiliki tiga fungsi diantaranya yaitu:

1. Merupakan alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Dapat digunakan sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).
3. Dapat digunakan sebagai alat pemindahan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah).

Kartu kredit merupakan suatu alat pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli barang dan jasa, pelunasan atas penggunaan kartu kredit dapat dilakukan sekaligus maupun secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang Kartu (*Card Holder*) diberikan kredit limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit (*Issuer*) sehingga dalam pemakaiannya tidak boleh melebihi dari limit. Apabila terjadi penggunaan yang melebihi limit maka pemegang kartu (*Card Holder*) wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi serta dengan tambahan angsuran wajib yang telah ditetapkan setiap bulan pada tanggal jatuh tempo, dana tersebut menjadi

keuntungan bank. Angsuran wajib adalah jumlah angsuran yang telah ditetapkan atas penggunaan kartu kredit sesuai batas plafon/limit.

Kartu kredit adalah suatu alat pembayaran baru yang dapat memberikan kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Dalam dunia perbankan kartu kredit dijadikan sebagai salah satu usaha perkembangan potensi, inisiatif serta kreasi dari alat-alat pembayaran jenis baru yang ada di sekitar masyarakat. Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh bank-bank di Amerika. Perkembangan kartu kredit sangat pesat, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor yang mendorongnya seperti kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu. Dalam mekanismenya kartu kredit melibatkan empat pihak yaitu, Penerbit (*Issuer*), Pemegang Kartu (*Card Holder*), Pedagang atau Pengusaha (*Merchant*), dan Pengelola (*Acquirer*) (Asuan, 2013).

Landasan Hukum dan Regulasi Kartu Kredit

Kartu kredit di Indonesia sedang marak, maka dari itu sangat ketat tingkat persaingan diantara para perusahaan penerbit. Para perusahaan penerbit meyakini bahwa potensi pasar kartu kredit di Indonesia masih besar, hal ini diharapkan mereka menjadi peluang mereka memperebutkan pangsa pasar (Rahayu et al., 2011). Sedangkan pada sisi masyarakat Kartu kredit ini adalah salah satu metode pembayaran yang disukai masyarakat Indonesia karena penggunaan kartu kredit memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan jual beli (Hermansyah, 2011).

Peraturan tentang kartu kredit ini pertama kali dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2004, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 ini ditujukan agar adanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.

Dan pada akhirnya dasar peraturan dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 yang isinya Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Namun, Bank Indonesia mengeluarkan lagi Peraturan Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu seperti berikut (Usman, 2001):

1. Seseorang yang sebagai pemegang kartu kredit utama telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Lalu ditambah dengan peraturan Pemegang kartu kredit berumur minimal 17 tahun.
2. Penghasilan pemegang kartu utama dalam sebulan minimal sebesar Rp3 juta.
3. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang kartu dengan penghasilan antara Rp3 juta - Rp10 juta.
 - a. Maksimal penerbit kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit yang berjumlah satu orang pemegang kartu adalah 2 penerbit kartu.
 - b. Total dari plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit kepada seorang pemegang kartu kredit adalah 3 kali penghasilan bulanan (bukti: slip gaji, faktur pajak, dan pembuktian lainnya).
 - c. Untuk pemegang kartu dengan penghasilan diatas Rp10 juta per bulan tidak ada peraturan khusus. Peraturan dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan risk appetite masing-masing.

Dalam Pasal 16A Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, yaitu berisi:

1. Lembar tagihan wajib disampaikan oleh penerbit kartu kredit kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.
2. Penerbit wajib memberitahukan Kelonggaran waktu pembayaran wajib diberitahukan oleh penerbit apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.

3. Penerbit dilarang mengenakan denda dilarang dikenakan oleh penerbit kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang kartu kredit pada kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat dua.
4. surat edaran Bank Indonesia berisi tentang ketentuan jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud lebih lanjutnya pada ayat satu dan kelonggaran waktu pembayaran yang dimaksud pada ayat dua.

Setelah Pasal 16A ada Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang berisi:

1. Informasi yang harus dicantumkan penerbit dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, kurang lebih mencakup:
 - a. Besar dari tagihan;
 - b. Batas dari minimal pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 - c. Penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
 - d. Plafon kredit dan sisa plafon kredit;
 - e. Tanggal transaksi;
 - f. Dan lain-lain.
2. Penyampaian perubahan informasi tersebut harus disampaikan penerbit kartu secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
3. Peraturan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian informasi tertulis yang dimaksud pada ayat satu, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Untuk Peraturan-peraturan lainnya secara lengkap bisa dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012.

Pihak-Pihak dalam Mekanisme Kartu Kredit

Dalam mekanismenya kartu kredit melibatkan empat pihak dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Penerbit (*Issuer*), merupakan pihak yang menerbitkan kartu kredit yaitu perbankan.
2. Pemegang Kartu (*Card Holder*), merupakan pihak yang memiliki kartu kredit atau sebagai pengguna kartu kredit.

3. Pedagang atau Pengusaha (*Merchant*), merupakan pihak-pihak yang menyediakan barang maupun jasa seperti Hotel, Restaurant, dan Supermarket.
4. Pengelola (*Acquirer*), merupakan pihak yang melakukan pembayaran serta penagihan terhadap kartu kredit antara pihak bank penerbit (*Issuer*) dan Pedagang/Pengusaha (*Merchant*).

Kelebihan dan Kekurangan Kartu Kredit

Kartu kredit memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai lainnya. Adapun dua pihak yang dapat merasakan keuntungan dari penggunaan kartu kredit yaitu:

1. Para Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*)
 - a. Menikmati fasilitas kredit dengan sesuai batas tertentu
 - b. Melakukan berbagai macam transaksi pembelian dalam satu waktu
 - c. Dapat membeli barang atau jasa dalam jumlah besar tanpa penggunaan uang tunai dan cek
2. Para Penerima Kartu Kredit (*Merchant*)
 - a. Masyarakat lebih senang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit
 - b. Kartu aman lebih aman daripada memegang uang tunai dalam jumlah yang besar
 - c. Kredit yang diberikan tanpa adanya kemungkinan risiko macet karena sudah dijamin oleh bank
3. Penerbit Kartu Kredit (*Issuer*)
 - a. Kartu kredit digunakan sebagai sarana promosi
 - b. Kartu kredit dapat menjadi salah satu penambah keuntungan

Menurut Zainal (2020), selain memiliki keuntungan kartu kredit juga dapat mengandung kerugian di antaranya yaitu (Husni, 2020):

1. Kerugian bagi Pihak Bank, apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah dalam mengambil uang atau

transaksi berbelanja bank akan sulit menagih karena dalam persetujuan kartu kredit tidak adanya jaminan benda berharga melainkan hanya jaminan bukti penghasilan saja sehingga resiko tidak tertagih sangat besar.

2. Kerugian bagi Pemilik/Pemegang Kartu, dalam penggunaan transaksi berbelanja pemegang/pemilik kartu akan lebih boros. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa tidak mengeluarkan uang tunai secara langsung untuk berbelanja. Selain itu sebagian Merchant mengenakan tambahan biaya setiap melakukan transaksi, misalnya adanya tambahan biaya sebesar 3% nilai nominal transaksi belanja.

Jenis-Jenis Kartu Kredit

Menurut Wardani, kartu kredit merupakan bentuk kartu kerjasama finansial. Kartu kredit dapat dibagi menjadi kedalam dua jenis antara lain yaitu (Wardani, 2016):

1. Kartu Kredit Pinjaman yang Dapat Diperbaharui (*Revolving Credit*), pemilik kartu ini diberikan berbagai pilihan cara untuk menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam waktu yang telah ditentukan ataupun secara sebagian dari jumlah tagihannya sehingga sisanya dapat ditunda dan ditambahkan pada tagihan berikutnya. Apabila terjadi penundaan pembayaran maka pemilik kartu akan dikenakan dua jenis bunga yaitu bunga keterlambatan dan bunga dari sisa-sisa dana yang belum tertutupi. Jika pemilik dapat menutupi sisa dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan maka ia hanya mendapat satu jenis bunga saja yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik oleh pemilik/pemegang kartu tidak akan habis jika ia terus-menerus melunasi tagihan serta bunga kartu kreditnya secara stimultan.
2. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (*Charge Card*), pemegang/pemilik kartu diwajibkan atau harus menutup total dana yang ditarik secara lengkap ataupun sebagian pada waktu yang telah ditentukan. Apabila pemilik kartu terlambat dalam pembayaran maka ia akan dikenakan denda keterlambatan dan jika ia menolak pembayaran keanggotaanya

akan dicabut, kartu kredit akan ditarik kembali dan persoalannya dapat dibawa ke pengadilan.

Menurut Zainul (2011) ada beberapa jenis kartu palstik yang memiliki penggunaan yang berbeda diantaranya yaitu:

1. Kartu Debet (*Debit Card*) adalah kartu yang digunakan sebagai perintah bayar terhadap pemegang rekening. Transaksi kartu kredit merupakan transaksi tunai dengan pembayaran dengan tidak menggunakan uang tunai tetapi pembebanan rekening bagi pemegang kartu debit dan kredit terhadap penerima kartu kredit (*Merchant*).
2. *Smart Card* yaitu kartu yang memiliki fungsi sebagai rekening terpadu yang dapat dihubungkan dengan rekening pribadi. Penyimpanan dan pembaruan data ada dalam microchip dimana pemegang kartu dapat mengetahui segala aktivitas rekeningnya.
3. *Cash Card*, merupakan kartu tunai atau disebut juga sebagai kartu ATM, yang dapat digunakan untuk suatu penarikan tunai di bank maupun anjungan ATM.

Sedangkan menurut wilayah berlakunya terdapat dua jenis kartu plastik yaitu:

1. Kartu Plastik Lokal, yaitu kartu plastik yang hanya dapat digunakan di wilayah tertentu atau suatu negara.
2. Kartu Plastik Internasional, yaitu kartu plastik yang dapat digunakan di seluruh negara atau dunia (Visa, American Express, Mastercard, dsb).

Mekanisme Operasional Kartu Kredit

Berkaitan dengan transaksi kartu kredit di dalamnya terdapat pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik yaitu (Yusuf, 2011):

1. *Issuer*/penerbit kartu kredit, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan serta mengelola kartu kredit.
2. *Acquirer* merupakan lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama terkait penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan pihak merchant.

3. *Card holder* (pemegang kartu), terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya.
4. *Merchant* merupakan pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual-beli barang atau jasa.

Mekanisme operasional atau sistem kerja pada kartu kredit yaitu (Syifa et al., 2018):

1. *Customer* (nasabah) mengajukan permohonan membuka kartu kredit dengan memenuhi syarat yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelitian terhadap kredibilitas dan kapasitas calon nasabah dan apabila disetujui, lembaga penerbit kartu akan menerbitkan kartu kredit.
3. Selanjutnya nasabah dapat melakukan transaksi pembelian dengan merchant.
4. Pihak *merchant* (pedagang) akan menagih ke bank sesuai dengan bukti transaksi.
5. Bank akan melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
6. Bank akan melakukan penagihan kepada nasabah pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
7. Pada tahap terakhir, nasabah sebagai pemegang kartu akan membayar kembali kepada bank.

Manfaat Kartu Kredit

Fungsi dari kartu kredit yang utama yaitu sebagai alat pembayaran yang praktis pengganti uang tunai, walaupun demikian tidak semua proses transaksi pembayaran bisa menggunakan kartu kredit. Kartu kredit sangat bermanfaat bagi seorang pedagang atau pengusaha, karena dapat membantu kelancaran transaksi. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing dalam memanfaatkan kartu kredit (Rahayu et al., 2011). Di jaman modern, seperti sekarang ini banyak yang salah menilai tentang kartu kredit. Mereka mengira penggunaan kartu

kredit hanya untuk mengikuti tren ataupun menjaga gengsi semata.

Untuk menarik nasabah (*customer*), banyak penerbit kartu kredit yang memberikan pelayanan khusus bagi nasabahnya seperti pemberian diskon pada pengguna kartu kredit tertentu. Namun dalam memanfaatkan kartu kredit perlu diperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan. Banyaknya manfaat yang di dapat dari kartu kredit, sebaiknya membuat kepemilikan kartu kredit disesuaikan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan yang diperlukan (Rahayu et al., 2011).

Konsep Sharia Card

Dalam bahasa arab kartu kredit adalah *bithaqah al-I'timan*. Sedangkan dalam Fiqih Muamalah diartikan sebagai pemberian hak kepada orang lain atas hartanya dengan adanya ikatan kepercayaan. *Shariah Card* merupakan fasilitas kartu talangan yang dipegang oleh pemilik kartu (*Card Holder*) yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau pengambilan uang tunai di suatu tempat tertentu yang harus segera dibayar lunas kepada pemberi talangan (*Mushdir al-Bithaqah*) pada waktu yang sudah ditetapkan (Mustofa, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa syariah card merupakan kartu yang memiliki fungsi yang sama seperti kartu kredit tetapi hukumnya berdasarkan dengan prinsip syariah. Adapun pihak-pihak dalam *syariah card* yaitu Penerbit Kartu (*Mushdir al-Bithaqah*), Pemegang Kartu (*Hamil al-Bithaqah*), dan Penerima Kartu (*Tajir/Qabir al-Bithaqah*) (Putra, 2015).

Mekanisme pemberlakuan denda pada syariah card berbeda dengan kartu kredit pada umumnya. Pemberlakuan denda atas penggunaan syariah card apabila terjadinya keterlambatan pembayaran dari tempo yang telah ditetapkan pemegang/ pengguna kartu dikenakan denda atau disebut sebagai penalti (*Late Charge*) sebesar 2,5% dari saldo yang telah digunakan. Dana dari denda tersebut dijadikan sebagai dana sosial. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank/penerbit sebagai salah satu cara

menjaga ketaatan nasabah dalam pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan (Lisman, 2020).

Perkembangan Syariah Card di Indonesia

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan industri bisnis dengan menggunakan sistem ekonomi Islam mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan lembaga perbankan maupun pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Adapun salah satu produk yang diterbitkan lembaga perbankan atau pembiayaan adalah kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Di Indonesia kartu kredit konvensional dan syariah card berjalan beriringan. Dengan adanya dua konsep kartu kredit yang ada di Indonesia memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi roda perekonomian negara. Pada awal tahun 2003 penggunaan syariah card di Indonesia mulai muncul. Dalam perkembangannya di Indonesia syariah card melalui banyak perdebatan dalam praktik maupun teori. Beberapa perbankan syariah seperti Bank Danamon Syariah, BNI Syariah dan HSBC syariah mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan *syariah card*. Pada tahun 2010 semenjak Bank Danamon Syariah menerbitkan produk *syariah card*, pengguna syariah card pada bank tersebut mencapai 21.000. Selain itu BNI Syariah juga menerbitkan produk Hasanah Card pada Februari 2009. Pengguna Hasanah Card pada awal Desember sebanyak 11.242 orang dan pada semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna. Perkembangan pengguna *syariah card* dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan *syariah card* dalam transaksi bisnis syariah (Firmanda, 2014).

Landasan Syariah terkait Kartu Kredit

Mengenai landasan hukum *sharia card* (*Bithaqah I'timan/ Credit Card*), yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum kebolehan kartu kredit, yaitu fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006. Alasan dari pihak DSN-MUI yaitu secara prinsip kartu kredit